

Judul : Menuju Parlemen Modern, Fahri Hamzah : Semakin Maju Demokrasi, DPR Makin 'Ribut'
Tanggal : Senin, 18 Februari 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Menuju Parlemen Modern Fahri Hamzah: Semakin Maju Demokrasi, DPR Makin 'Ribut'

DALAM studi yang dilakukan Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ), yakni sebuah lembaga swadaya dari Jerman menyebutkan Parlemen Indonesia menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen negara kawasan. Kendati begitu, DPR masih perlu berinovasi, tidak hanya dalam kerja-kerja legislasi tapi juga bagaimana berinteraksi dengan publik. Sebab dalam praktiknya, Parlemen Indonesia sangat terbuka kepada *stakeholders*-nya.

"Kita tentu bangga jika DPR dinilai paling terbuka karena itu artinya salah satu indikator membaiknya demokrasi Indonesia, Alhamdulillah," ujar Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi dan Modernisasi DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Bernardo R. Aguin selaku Koordinator GIZ itu.

Fahri Hamzah memang dikenal sebagai konseptor dan paling gigih memperjuangkan perbaikan di lembaga perwakilan rakyat ini. Menurut Fahri DPR adalah perlambang lahirnya daulat rakyat dan demokrasi. Karenanya tidak punya pilihan, penguatan DPR untuk menuju ke arah Parlemen Modern adalah keharusan. Parlemen modern sendiri, berfokus pada tiga aspek utama, yakni meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi digital, dan optimalisasi performa fungsi representasi, sehingga akan mendekatkan diri dan lebih terbuka kepada masyarakat umum.

Untuk mewujudkan Parlemen modern tersebut, DPR RI lewat Tim Reformasi tengah membangun tonggak-tonggak lanjutan dari ikhtiar tersebut, setahap demi setahap. Keinginan DPR ini adalah betul-betul memiliki satu tradisi legislatif atau lembaga perwakilan yang baku. Bahkan, Tim Implementasi Reformasi DPR RI dibawah pimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah melakukan sejumlah kunjungan ke negara-negara yang memiliki konsep parlemen modern, antara lain Parlemen Amerika Serikat The House of Representative Parlemen Australia di Canberra, terakhir kunjungan ke Assemblée Nationale (Parlemen) Paris di Prancis, yang juga dalam rangka merampungkan kerja konseptual tentang bagaimana kelembagaan parlemen yang ideal ke depan.

Selama di Paris, Tim Implementasi Reformasi DPR juga ingin menyelesaikan dokumen-dokumen yang menjadi bahan bagi legislasi kelembagaan DPR ke depan, baik Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan di bawahnya. Delegasi Tim



Implementasi Reformasi DPR selama di Prancis, juga berdiskusi dengan KPK-nya Prancis, untuk mengidentifikasi bagaimana caranya supaya Parlemen itu tidak dikaitkan dengan isu korupsi. "Saya kira itu yang ingin kita dapatkan, selain kerja sama teknis, juga ada MoU dengan beberapa Parlemen, termasuk dengan Parlemen Amerika. Karena itu, Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR dan Badan Keahlian/BK itu, sampai sekarang punya kerjasama langsung untuk memperkuat SDM yang ada, yakni sistem pendukung kinerja DPR RI," Fahri menambahkan.

Dalam kunjungan ke Parlemen Prancis, delegasi Tim Implementasi Reformasi DPR membawa dua agenda. Pertama, melakukan pertemuan dengan Agence Francaise Anticorruption (AFA, Badan Antikorupsi Perancis) yang dipimpin Direktur Charles Duchaine. Pada 2016, AFA menghentikan represi/ penindakan korupsi dan kini berfokus pada pencegahan. Kedua, pertemuan dengan Dubes RI untuk Prancis Letjen TNI (Purn) Hotmangaradja M.P. Pandjaitan di Kedubes RI di Paris. Selain itu, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Parlemen Prancis dan diterima oleh Raphael Gerard selaku Ketua Fraksi Partai Berkuasa yaitu En Marche di Parlemen Prancis, dengan tema Modernisasi Parlemen.

Saat menyaksikan Parlemen Prancis bersidang, Fahri Hamzah selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI berharap kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Prancis dapat ditingkatkan, termasuk sistem pendukung kepada Anggota Parlemen. "Karena itu, kami ingin sekali kerja sama ditingkatkan. Mudah-mudahan, Kaukus Kerja sama Indonesia - Prancis di Parlemen ini, bisa bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari Parlemen Indonesia," harapnya lagi.

Delegasi Tim Implementasi Reformasi DPR RI itu, mengaku cukup kaget melihat Rapat Paripurna Parlemen Prancis yang cukup gaduh. Karena dia mengira semakin *advance* demokrasinya, DPR-nya semakin sepi dari kegaduhan. "Ternyata justru, semakin *advance* demokrasinya, DPR ini semakin ribut," kata Fahri yang lantas menceritakan pengalamannya saat memimpin sidang DPR, dimana salah satu anggotanya hampir memukul pimpinan sidang. "Tetapi, itu dulu. Sekarang, setelah era digital tidak ada lagi peristiwa tersebut karena orang dibatasi bicara secara otomatis melalui mikrofon. Itulah di antara yang akan kami perbaiki ke depan, dan mudah-mudahan kami bisa kerja sama terus dengan Parlemen Prancis ini," sebut Fahri.

DPR RI memang menetapkan transparansi sebagai salah satu indikator parlemen modern dalam Rencana Strategis DPR RI 2015 - 2019. Indikator lainnya adalah, peningkatan representasi, dan penggunaan teknologi informasi. Banyak inisiatif untuk diimplementasikan dalam rangka reformasi parlemen di Indonesia. Muaranya mencakup tiga aspek, yakni: penguatan sistem kelembagaan dewan, penguatan sistem pendukung dewan, dan kemandirian DPR RI.

Hingga saat ini, novasi yang sudah dilakukan oleh DPR RI periode sekarang adalah diluncurkannya aplikasi DPR NOW!, pada Agustus 2018 lalu. Bahkan, sejak aplikasi ini diluncurkan, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018. Terobosan baru lain yang akan dilakukan dengan menerapkan e-voting dalam pengambilan keputusan di DPR RI. Termasuk hadirnya Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), sebagai perwujudan dari parlemen modern dan terbuka tersebut.

[*/Info]